

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan secara tradisional dapat diartikan sebagai kapasitas dari perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurung waktu yang cukup lama menuju peningkatan pendapatan nasional bruto atau GNI (*gross national income*) tahunan (Todaro;2006:19). Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu Negara meningkat secara berkelanjutan dalam waktu jangka panjang (Sadono Sukirno, 2010:11).

Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan suatu perubahan total dari suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok–kelompok sosial yang ada di dalamnya. Pembangunan memiliki tujuan akhir yaitu bergerak maju menuju kondisi kehidupan yang lebih baik.

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang pada saat ini adalah pembangunan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia (*human development*). Perubahan paradigma pembangunan pada dasarnya menjadikan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan sebagai alat pembangunan. Pembangunan manusia menekankan terpenuhinya kehidupan yang layak bagi manusia, baik layak secara materi maupun non materi. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Pembangunan merupakan suatu kegiatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, kemajuan dan informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan sosial.

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya oleh karena itu, manusia selalu menjadi sasaran dari pembangunan suatu bangsa. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat yang menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai akhir dari tujuan pembangunan bukan alat dari pembangunan. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar masyarakat dapat teratasi. Masalah–masalah tersebut meliputi : kemiskinan, pengangguran, gizi buruk dan buta huruf. Dalam pelaksanaan pembangunan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah perlu adanya paradigma baru yakni pembangunan yang lebih mengedepankan pembangunan manusia.

Indeks pembangunan manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*). IPM menjadi indikator terpenting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dan memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM mempunyai tiga unsur yaitu: kesehatan, pendidikan dan standar kehidupan atau yang disebut ekonomi. Jadi IPM di suatu daerah akan meningkat

apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Dengan kata lain terdapat suatu korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi (Tambunan 2003).

Angka IPM terdiri dari tiga komponen yaitu: kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup layak. Jadi setiap kabupaten/kota yang memiliki angka IPM mendekati angka 100 maka pembangunan daerah yang ada di daerah tersebut semakin baik, sedangkan daerah yang memiliki angka IPM mendekati nol maka daerah tersebut memiliki pembangunan manusia yang buruk. Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan bangsa–Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

Tabel : 1.1
Peringkat Kinerja IPM menurut PBB

Nilai IPM	Peringkat IPM
80,0 – 100,0	sangat Tinggi
66,0 – 79,9	Menengah Atas
50,0 – 65,9	Menengah Bawah
0,0 – 50,0	Rendah

(Sumber dari BPS-Bappenas-UNDP, 2011)

Perhitungan IPM dapat dilakukan setelah perhitungan indeks setiap komponen IPM dilakukan terlebih dahulu. Untuk menghitung indeks masing–masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum. Setelah melakukan perhitungan indeks setiap komponen IPM barulah kita dapat menghitung nilai IPM dengan Rumus sebagai berikut:

$$IPM = \{X_1 + X_2 + X_3\} / 3$$

Dimana :

X_1 = Indeks Angka harapan Hidup.

X_2 = $2/3$ (Indeks Melek Huruf) + $1/3$ (Indeks Rata–Rata Lama Sekolah)

X_3 = Indeks Komsumsi Perkapita yang disesuaikan. (sumber dari BPS).

Perkembangan IPM Kabupaten Belu periode tahun 2010–2019 terus mengalami peningkatan. Berikut ini adalah data perkembangan IPM:

Tabel : 1.2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Belu Periode Tahun 2010 – 2019.

No.	Tahun	Angka IPM
1	2010	55,78
2	2011	56,63
3	2012	57,58
4	2013	59,12
5	2014	59,72
6	2015	60,54
7	2016	61,04
8	2017	61,44
9	2018	61,86
10	2019	62,54

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2020

Dari tabel data perkembangan IPM di atas, dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Belu selama sepuluh tahun terakhir selalu meningkat setiap tahun dimana tahun 2010 adalah angka IPM terendah yaitu sebesar 55,78%, dan tahun 2019 adalah angka IPM tertinggi yaitu sebesar 62,54%.

Berdasarkan kriteria penilaian Indeks Pembangunan manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan bangsa–Bangsa (PBB), menetapkan bahwa setiap kabupaten/kota yang memiliki angka IPM mendekati angka 100 maka pembangunan daerah yang ada di daerah tersebut semakin baik, sedangkan daerah yang memiliki angka IPM mendekati nol maka daerah tersebut memiliki pembangunan manusia yang buruk. Jika dilihat dari kriteria penilaian

pembangunan manusia yang dikeluarkan oleh PBB, dapat dikatakan bahwa peringkat kinerja IPM Kabupaten Belu termasuk dalam kategori Menengah Bawah. Hal ini berarti bahwa pencapaian nilai IPM kualitas pembangunan manusia Kabupaten Belu dari unsur dasar IPM yaitu Pendidikan, kesehatan dan ekonomi termasuk dalam kategori menengah bawah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang baik maka pemerintah memerlukan anggaran untuk menunjang pembangunan manusia, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sektor–sektor penunjang pembangunan manusia seperti sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi juga mengalami peningkatan anggaran tiap tahun. Sejalan dengan terus meningkatnya anggaran belanja di ketiga sektor tersebut, nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belu juga berpengaruh terhadap alokasi anggaran di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi yang dapat meningkatkan nilai Pembangunan Manusia Seperti: Anggaran dalam bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup maupun mampu menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai salah satu komponen dalam penentuan pembangunan manusia (sahrah,2007). Anggaran dalam bidang pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan angka melek huruf. Anggaran dalam bidang ekonomi akan meningkatkan akses masyarakat bidang ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi per kapita.

Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa peningkatan IPM Kabupaten Belu selama lima tahun terakhir termasuk

dalam kategori menengah bawah dan seberapa besarkah pengeluaran anggaran sehubungan dengan alokasi anggaran pendidikan, alokasi anggaran kesehatan dan alokasi anggaran ekonomi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belu.

Berdasarkan uraian pada pendahuluan diatas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul Skripsi : **"Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Belu"**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran tentang Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belu?
2. Bagaimana pengaruh alokasi anggaran di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi secara Simultan terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belu?
3. Bagaimana pengaruh alokasi anggaran di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi secara Parsial terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belu?

1.3. Tujuan Masalah

Bertitik tolak dari rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui Gambaran tentang Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belu.

2. Untuk menjelaskan pengaruh alokasi anggaran di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi secara Simultan terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belu.
3. Untuk menjelaskan pengaruh alokasi anggaran di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi secara Parsial terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belu.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Instansi.

Peneliti ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Instansi terkait dalam hal Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belu.

2. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ilmu dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu Ekonomi khususnya bidang Ekonomi Pembangunan.

3. Bagi Peneliti.

Untuk menambah pengetahuan penulis tentang Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belu dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Ilmu Ekonomi studi pembangunan, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira.